



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SLAMET TRIYANTO, S.Sos.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **P A N D I, S.Sos.**

Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2025

Pihak Kedua,

**P A N D I, S.Sos.**

NIP. 19690717 199101 1 003

Pihak Pertama,

**SLAMET TRIYANTO, S.Sos.**

NIP. 19670625 199311 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**BIDANG KESATUAN BANGSA**

| NO | SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                           | SATUAN  | TARGET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1  | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                          | Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Budaya                                                                                                                           | Orang   | 200    |
|    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                      | Jumlah rekomendasi terkait Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti                                                                                                          | Dokumen | 12     |
|    | - Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                        | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun               | Dokumen | 12     |
|    | - Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah       | Orang   | 900    |
|    | - Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                  | Orang   | 20     |
|    | - Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Laporan | 12     |
| 2  | Terlaksananya Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial                                                                                                        | Jumlah Potensi Konflik Sosial yang terpantau                                                                                                                                                                                | Potensi | 35     |
|    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                               | Jumlah laporan Bulanan Potensi Kerawanan Sosial dan Jumlah Laporan Deteksi Dini Konflik yang terjadi di Wilayah                                                                                                             | Laporan | 12     |
|    | - Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan                                                                                           | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan                                                                    | Dokumen | 12     |



| NO | SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN  | TARGET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    | Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                                                                                                                                                     | Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                        |         |        |
|    | - Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                  | Orang   | 400    |
|    | - Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Laporan | 12     |
|    | - Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota                                                                                                                                                                                                          | Dokumen | 12     |
| 3  | <b>Meningkatnya cakupan pendidikan wawasan kebangsaan</b>                                                                                                                                                                                                                             | Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan                                                                                                                                                                                                                          | Persen  | 31,90  |
|    | <b>Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>                                                                                                                                                                      | Jumlah rekomendasi terkait Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                         | Dokumen | 12     |
|    | - Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun                                                                                                             | Dokumen | 12     |
|    | - Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                | Orang   | 700    |
|    | - Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                | Laporan | 12     |

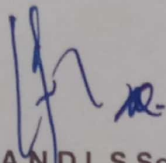
| NO | SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN      | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
|    | - Terbentuknya pasukan pengibar Bendera Pusaka | Jumlah Paskibraka | Orang  | 31     |

| NO | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                            | ANGGARAN           | KET. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| 1. | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                                                  | Rp 764.056.000,00  |      |
|    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang IDEologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                       | Rp 764.056.000,00  |      |
|    | - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                              | Rp 18.000.000,00   |      |
|    | - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                | Rp 181.900.000,00  |      |
|    | - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                         | Rp 2.500.000,00    |      |
|    | - Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                      | Rp 561.056.000,00  |      |
| 2. | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                                                                                                                                                                      | Rp 193.650.000,00  |      |
|    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                             | Rp 193.650.000,00  |      |
|    | - Penyusunan Program Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukuran Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                             | Rp 30.000.000,00   |      |
|    | - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukuran Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                             | Rp 153.600.000,00  |      |
|    | - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukuran Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                            | Rp 9.050.000,00    |      |
|    | - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukuran Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                    | Rp 1.000.000,00    |      |
| 3. | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                    | Rp1.147.990.000,00 |      |
|    | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                      | Rp1.147.990.000,00 |      |
|    | - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Rp 423.930.000,00  |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         | Rp 414.520.000,00 |  |
| - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Rp 60.150.000,00  |  |
| - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | Rp 249.390.000,00 |  |

Purbalingga, Januari 2025

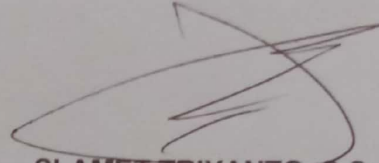
Pihak Kedua,



PANDI, S.Sos.

NIP. 19690717 199101 1 003

Pihak Pertama,



SLAMET TRIYANTO, S.Sos.

NIP. 19670625 199311 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **JOKO SUYANTO, S.Kom**

Jabatan : **KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **P A N D I, S.Sos.**

Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, Januari 2025

Pihak Kedua,

**P A N D I, S.Sos.**

NIP. 19690717 199101 1 003

Pihak Pertama,

**JOKO SUYANTO, S.Kom.**

NIP. 19720104 200604 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

**BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

| NO | SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN  | TARGET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1  | Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik                                                                                                                                                                                               | Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik                                                                                                                                                                                                           | Persen  | 0,64   |
|    | a. Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah rekomendasi terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang ditindaklanjuti | Dokumen | 12     |
|    | - Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                              | Dokumen | 2      |
|    | - Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                         | Orang   | 627    |
|    | - Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan                                                                                                                                                             | Laporan | 12     |

| NO | SASARAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                        | SATUAN  | TARGET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         | Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                                     |         |        |
| 2  | Terlaksananya Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                 | Persentase Ormas yang terbina                                                                                                                                                            | Persen  | 100    |
|    | a. Tersusunya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                              | Jumlah rekomendasi terkait pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti                                                      | Dokumen | 12     |
|    | - Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                        | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun               | Dokumen | 12     |
|    | - Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah       | Orang   | 1000   |
|    | - Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Laporan | 12     |

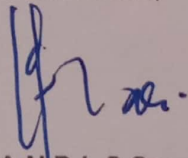
| NO | PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                   | ANGGARAN            | KET. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| 1. | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik                                                                                                                                            | Rp 2.103.713.000,00 |      |
|    | a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Rp 2.103.713.000,00 |      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|    | - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         | Rp 1.909.129.000,00 |  |
|    | - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                        | Rp 102.084.000,00   |  |
|    | - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporandi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umu/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Rp 92.500.000,00    |  |
| 2. | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                         | Rp 1.468.266.000,00 |  |
|    | a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                 | Rp 1.468.266.000,00 |  |
|    | - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                           | Rp 207.766.000,00   |  |
|    | - Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                              | Rp 1.258.000.000,00 |  |
|    | - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                     | Rp 2.500.000,00     |  |

Purbalingga, Januari 2025

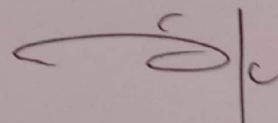
Pihak Kedua,



**PANDI, S.Sos.**

NIP. 19690717 199101 1 003

Pihak Pertama,



**JOKO SUYANTO, S.Kom.**

NIP. 19720104 200604 1 011